

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt TENTANG
PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI**

OLEH :

MUZHAKIR KURNIA SINANDAKA

NIM :1011415102

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. NUR MOHAMAD KASIM, S.Ag MH
NIP. 197602082003122002

Pembimbing II



NUVAZRIA ACHIR, SH., M.H
NIP.198510052018032001

Mengetahui :

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP: 19830622 2009121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt TENTANG
PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI**

OLEH :

MUZHAKIR KURNIA SINANDAKA

NIM :1011415102

Telah diperiksa dan disetujui

DEWAN PENGUJI

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019

Pukul : 13.20 – 14.00

1. **Hj. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum**
NIP. 196907041998022001

2. **Moh. Zulfikar Sarson, SH., MH**
NIP. 198909032016071001

3. **Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH**
NIP. 197602082003122002

4. **Nuvazria Achir, SH., MH**
NIP. 198510052018032001

Gorontalo, Juli 2019

Mengetahui :

Plt. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH

NIP. 197412232003 122 011

ABSTRAK

Muzhakir Kurnia Sinandaka, Nim 1011415102. Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan Ibu Nurvazria Achir, SH., MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, dalam melaksanakan perkawinan poligami menjadikan ajaran tersebut sebagai rujukan yang utama. Namun dewasa ini terdapat beberapa kasus terkait perkawinan poligami seperti permohonan poligami yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan agama maupun permohonan poligami yang ditolak oleh hakim (studi kasus: putusan 4.33/Pdt.G/2013/PA Lbt. tentang izin berpoligami di Pengadilan Agama Limboto) yang menurut hemat penulis putusan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, penulis merujuk pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat penelitian dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI**”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dikabulkannya izin poligami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara poligami yang diajukan oleh pemohon dengan menggunakan pertimbangan yang dilihat dari sisi Ekonomi Pemohon, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, dan Prinsip Keadilan. Adapun faktor-faktor yang membuat hakim menolak permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon dikarenakan faktor ekonomi atau penghasilan dari pemohon tidaklah cukup untuk membiayai kedua istri dan anak-anaknya apabila dikabulkan.

KATA KUNCI: *Perkawinan dan Poligami*

ABSTRAK

Muzakir Kurnia Sinandaka, NIM 10111415102, "The Analysis of Decree Number 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt about the fulfillment of Polygamy Requirements". Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, MH as Advisor I and Nurfazria Achir, SH, MH as advisor II. Faculty of Law of Universitas Negeri Gorontalo.

Indonesia, which its majority of population is Islam, in implementing polygamy marriage refers mainly to Islam. However, recently, several cases regarding polygamy proposal are not granted by Religious Court and there are several others that are declined by the judge (case study: decree 4.33/pdt.G/2013/PA Lbt about polygamy approval in Limboto Religious Court). This is contradicted with existed regulation namely Law No. 1 year 1974 about marriage and compilation of Islamic Law. Regarding this, this research title is "**The Analysis of Decree Number 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt about the fulfillment of Polygamy Requirements**". This aims to find out and to analyze the factors for not granting polygamy.

This research applies empirical normative law as its method which is a combination of normative law approach by adding several empirical elements. This method is the implementation of normative law in its action regarding certain legal events in a society.

The research shows that the judge's verdict on polygamy cases is based on plaintiff economic condition, human rights, legal certainty and equity principles. The factors that cause the judge to not grant polygamy appeal are economy condition or inadequate income of the plaintiff to finance wives and children.

KEYWORDS: *Polygamy Marriage*

